

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.<sup>1</sup>

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pidana ialah bentuk atau jenis sanksi yang dijatuhkan atau dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hal. 37

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti. 2001. *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal.11

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan apa yang diharuskan atau yang dilarang oleh hukum itu sendiri. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat, karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Hal ini menempatkan Hukum Pidana dalam pengertian hukum pidana materiil, sedangkan Hukum Acara Pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil sehingga disebut hukum pidana formil.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut Utrecht bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>5</sup>

Segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada ppidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Ppidanaan adalah serangkaian dasar hukum dan pertimbangan yang dijadikan landasan untuk memutuskan perlu

---

<sup>3</sup> Hartono Hadisoeparto. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal.120

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.4

<sup>5</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 7

tidaknya penjatuhan atau pengenaan pidana atau sanksi ataupun pemberian tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>6</sup> Untuk itu dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pemidanaan, oleh karena itu hakim akan sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, akibatnya adalah timbul praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang dirasakan sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan sosial dan politik akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparatur pemerintah maupun pelaku dunia usaha, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tidak hanya mereka yang kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat dilakukan mereka yang kecukupan dari segi ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang mampu dalam segi ekonomi biasanya kejahatan yang dilakukan tergolong besar atau tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada kenyataannya sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi,

---

<sup>6</sup> *Op.Cit.* Natangsa Surbakti. Hal.11

<sup>7</sup> Eddy Djunaedi. 1983. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal.1

bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Problem sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Susanto menyatakan bahwa “*Kejahatan adalah setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang pidana* ”.<sup>8</sup>

Dikalangan masyarakat kita ada beberapa sebutan yang sering kita dengar mengenai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) yaitu terpidana (pelaku pertama) dan residivis. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan di pengadilan dia terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dia akan menerima putusan dari pengadilan yaitu berupa putusan

---

<sup>8</sup> Susanto. 1995. *Kriminologi*. Semarang: UNDIP Press. Hal 4

pidana. Dalam hal ini orang itu disebut dengan terpidana. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sementara itu ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menerima putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, akan tetapi setelah dia selesai menjalani hukuman tersebut, dia di luar sana melakukan atau mengulangi suatu tindak pidana lagi. Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang demikian ini disebut dengan residivis. Seseorang dapat dikatakan sebagai residivis apabila melakukan kejahatan baik sejenis maupun tidak sejenis, antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yaitu berupa hukuman penjara antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak si terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>9</sup>

Pengulangan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah residivis semakin marak terdengar, hal ini tentunya menjadi suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan).<sup>10</sup> Seorang residivis dapat melakukan tindak pidana lebih dari dua kali, kasus-kasus yang sering muncul

---

<sup>9</sup> Sriyanto. 2009. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Atas Kejahatan Harta Benda Khususnya Pencurian*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Dikutip pada <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=470&id=162106&lok=1>. Diakses pada hari Minggu. Tanggal 9 Oktober 2011 Pukul 15.35 WIB

<sup>10</sup> Bayu, Irsahara. 2007. *Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat)*. Dikutip pada <http://eprints.lib.ui.ac.id/>. Diakses pada hari Minggu. Tanggal 9 Oktober 2011 Pukul 16.05 WIB

merupakan kasus yang sama dengan kasus tindak pidana yang telah dilakukan dan mendapatkan pidana. Motif residivis ketika mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebagian besar adalah sama seperti motif-motif sebelumnya. Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang akan meringankan penjatuhan pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat. Akan tetapi berbeda dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh residivis, biasanya penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh residivis hukumannya lebih berat karena dia pernah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dia lakukan sebelumnya dan ternyata sanksi tersebut tidak membuatnya jera melainkan membuat dia melakukan sebuah tindak pidana lagi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul: **"PERBANDINGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMA DAN RESIDIVIS"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pertama dan residivis?

2. Apakah ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pertama dan residivis?
3. Apakah penjatuhan sanksi pidana yang ringan merupakan faktor pendorong terjadinya pengulangan tindak pidana?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing hukum penelitian.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pertama dan residivis.
2. Untuk mengetahui perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pertama dan residivis.
3. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana yang ringan merupakan faktor terjadinya pengulangan tindak pidana.

Sementara itu manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis

---

<sup>11</sup> Sumarjati Harjono. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press. Hal. 4

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis.
2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan menjunjung nilai-nilai keadilan hukum, sehingga sebagai negara yang berdasarkan hukum maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dimasyarakat. Pencapaian tujuan itu tentunya harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat, berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat Indonesia pada setiap saat maupun pada semua tempat baik itu di desa, maupun di kota sekalipun sering kali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal.160-161



orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindak pidana pada umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi.

Seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi pidana akibat dari perbuatan yang dilakukannya memang bisa dibenarkan namun juga harus dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Ada yang melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, kemiskinan, adanya kesempatan dan tentunya semua itu pada dasarnya berasal dari niat si pelaku tindak pidana itu sendiri.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana baik itu disengaja atau tidak, maka orang tersebut harus tetap dihukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat pada umumnya menyebut seseorang yang telah melakukan tindak pidana adalah narapidana dan residivis, dimana mereka adalah orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan telah diberi hukuman oleh hakim yang berwenang memutus perkara yang mereka lakukan tersebut.

Dalam penjatuhan hukuman terhadap narapidana (pelaku pertama) dengan residivis sangatlah berbeda karena memang hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan sanksi terhadap residivis. Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada residivis yaitu (1/3) sepertiga lebih berat dari pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada narapidana (pelaku pertama).

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis dalam suatu proses penelitian. Sementara itu, penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan tentang cara mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan data yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku suatu karya ilmiah.<sup>14</sup>

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Mardalis. 1999. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 24

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 26

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jadi, dalam hal ini penulis ingin melakukan pendekatan yuridis terhadap praktik perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif<sup>15</sup> yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang ketentuan yuridis dan praktik perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Klaten dengan alasan bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di tiga Pengadilan Negeri tersebut, karena di sana terdapat cukup banyak adanya kasus tindak pidana baik yang dilakukan oleh pelaku pertama maupun residivis, selain itu lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu".

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis secara langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Klaten berupa sejumlah keterangan atau fakta-fakta mengenai perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis.

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau literatur, Berita Acara Persidangan dan Putusan Hakim dari ketiga Pengadilan Negeri tersebut.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

### b. Wawancara (interview)

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>17</sup> Yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana (residivis) dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo serta Pengadilan Negeri Klaten.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal.12

<sup>17</sup> S. Nasution. 2001. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Buana Aksara. Hal 113.

Jadi, dalam hal ini nantinya penulis akan bertanya secara langsung kepada pelaku tindak pidana (residivis) dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Sukoharjo dan Pengadilan Klaten yang sebelumnya penulis mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dan responden akan menjawab secara bebas dengan permasalahan yang diajukan.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan dan juga secara nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>18</sup> *Op.Cit.* Soerjono Soekanto.1984. Hal 15

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang terpidana, tinjauan umum tentang residivis dan tinjauan umum tentang pembedaan.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini diuraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pertama maupun residivis, perbandingan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertama dan residivis, dan faktor penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan oleh hakim sehingga menimbulkan banyaknya terjadi pengulangan tindak pidana.

Bab IV penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.